

MOBILITAS PEKERJA DAN PORTABILITAS KEPESERTAAN BPJS

LABOR MOBILITY AND PORTABILITY OF SOCIAL INSURANCE

Galih Saputro^{1*}

¹Program Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Turro S. Wongkaren²

²Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Paksi C. K. Walandouw³

³Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

***Korespondensi: galihsp93@gmail.com**

Abstrak

Isu portabilitas perlu mendapat perhatian seiring meningkatnya mobilitas pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan mobilitas pekerja dan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner pada data Sakernas Agustus 2023. Hasil analisis menunjukkan pekerja yang melakukan mobilitas, baik mobilitas geografis maupun mobilitas pekerjaan, memiliki kecenderungan tidak memiliki jaminan sosial dibandingkan pekerja yang tidak melakukan mobilitas. Pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi antar regional memiliki risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial lebih besar daripada pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi satu regional. Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial yang paling besar adalah pekerja yang pindah pekerjaan ke sektor konstruksi. Pekerja yang pindah pekerjaan menjadi *white collar* memiliki risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial paling kecil dibandingkan risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang pindah ke *grey collar* atau *blue collar*. Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang melakukan mobilitas disebabkan oleh keharusan untuk mendaftar ulang atau pemutakhiran data. Jabatan, sektor pekerjaan, kondisi geografis, infrastruktur di daerah, kebijakan perusahaan dan kurangnya sosialisasi (informasi) serta faktor kesengajaan dapat mempengaruhi keputusan pekerja untuk melakukan pendaftaran ulang atau pemutakhiran data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia kurang portabel.

Kata Kunci: Mobilitas Pekerja, Kepesertaan Jaminan Sosial, Portabilitas, Regresi Logistik Biner

Abstract

The issue of portability needs more attention as a result of increasing labor mobility. This study aims to analyze the relationship between labor mobility and social insurance participation in Indonesia. This study use binary logistic regression analysis on Sakernas data of August 2023. The results show that workers who moved geographically or moved to another job are less likely to have social insurance than workers who didn't move. Workers who moved between provinces between regions have a higher risk of losing social insurance than workers who

moved between provinces within region. Workers who moved to the construction sector have the highest risk of losing social insurance. Workers who moved to become white collar have the smallest risk of losing social insurance compared to the risk of losing social insurance of workers who moved to gray collar or blue collar. The risk of losing social insurance of moved workers is caused by the requirement to re-register or update data. Occupation, employment sector, infrastructure, geographical conditions, company policies and lack of information as well as deliberate factor can affect workers' decision to do this process. These findings show that social insurance in Indonesia are less portable.

Keywords: *Labor Mobility, Social Insurance Participation, Portability, Binary Logistic Regression*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap individu (*declaration of human rights* pasal 22 dan 25, 1948), termasuk pekerja. Perlindungan sosial penting untuk melindungi individu dari berbagai risiko ekonomi maupun sosial seperti kehilangan pendapatan, sakit, kecelakaan kerja, hingga memasuki usia pensiun. Salah satu isu penting dalam sistem perlindungan sosial adalah cakupan (*coverage*) yang masih rendah. Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, sebanyak 41.560.938 pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2023. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan jumlah pekerja di Indonesia secara keseluruhan yang mencapai 139,8 juta pekerja menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Dengan kata lain, hanya sekitar 30 persen saja pekerja di Indonesia yang terlindungi oleh jaminan sosial.

Selain isu cakupan yang masih rendah, isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah isu portabilitas. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju membuat pasar tenaga kerja semakin dinamis dan menyebabkan mobilitas pekerja yang semakin tinggi. Mobilitas atau migrasi tenaga kerja seringkali dikaitkan dengan pencarian peluang ekonomi yang lebih baik. Mobilitas atau migrasi ini menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi, termasuk kemungkinan hilangnya akses terhadap program jaminan sosial. Isu portabilitas menjadi penting seiring meningkatnya mobilitas pekerja.

Penelitian-penelitian mengenai kepesertaan jaminan sosial di Indonesia sudah dilakukan sebelumnya, namun masih berfokus pada cakupan kepesertaan jaminan sosial, terutama pekerja informal (Satriawan, Pitoyo, dan Giyarsih, 2021; Diana dan Syarvina, 2022; Wahyu dan Yuliana, 2023). Belum ada penelitian yang mengaitkan kepesertaan jaminan sosial dengan mobilitas atau perpindahan pekerja di Indonesia. Bagi pekerja, berpindah antar wilayah atau antar pekerjaan dapat menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap jaminan sosial karena kurangnya portabilitas jaminan sosial. Hilangnya akses terhadap program jaminan sosial berarti hilang pula perlindungan yang didapatkan oleh pekerja tersebut dari risiko-risiko yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hubungan mobilitas tenaga kerja dengan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Menurut *Asian Development Bank* (2016), terdapat tiga program perlindungan sosial utama, yaitu jaminan sosial (*social insurance*), bantuan sosial (*social assistance*), dan program pasar tenaga kerja. Menurut Schüring dan Loewe (2021), perlindungan sosial memiliki 4 fungsi dasar, yaitu fungsi pencegahan atau

preventif (membantu mencegah kemiskinan), fungsi perlindungan atau protektif (berkontribusi pada pengentasan kemiskinan), fungsi promotif (menstabilkan pendapatan dan memungkinkan untuk terbebas dari kemiskinan), fungsi transformatif (menghilangkan hambatan terhadap kesetaraan sosial sehingga mencapai penghidupan yang berkelanjutan).

Di Indonesia, perlindungan sosial, khususnya untuk jaminan sosial (skema kontribusi), terdiri atas jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menurut Mankiw (2021), ada empat prinsip ekonomi yang mendasari seseorang untuk mengambil keputusan. Prinsip pertama yaitu individu menghadapi “*trade-off*”. Kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Terkait prinsip pertama dan kedua, memilih memiliki jaminan sosial berarti harus mengorbankan sesuatu yang lain, dalam hal ini yaitu sebagian pendapatan yang digunakan untuk membayar premi (iuran) yang seharusnya dapat digunakan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang lain. Prinsip ketiga yaitu individu yang rasional mempertimbangkan selisih (margin). Sebagai makhluk ekonomi, individu bersikap rasional dan akan membuat keputusan atau pilihan dengan tujuan memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Dalam konteks kepemilikan jaminan sosial, pekerja akan mempertimbangkan dengan membandingkan biaya iuran atau premi jaminan sosial dengan manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Jika manfaat yang diperoleh di masa depan dianggap lebih besar daripada biaya premi saat ini, maka pilihan untuk memiliki jaminan sosial menjadi lebih rasional. Keputusan memiliki jaminan sosial akan berbeda antar individu tergantung dari faktor umur, pendapatan, status dalam keluarga, pekerjaan, jabatan, pengetahuan (informasi) dan bahkan preferensi individu terhadap jaminan sosial. Prinsip keempat yaitu individu reaktif terhadap insentif. Kebijakan pemerintah terkait eligibilitas, besaran manfaat, dan kebijakan pajak juga dapat menjadi insentif yang memengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki jaminan sosial. Selain itu, faktor eksternal seperti infrastruktur dan kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki jaminan sosial.

Mobilitas tenaga kerja di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mobilitas geografis (spasial) dan mobilitas pekerjaan (BPS, 2024). Mobilitas geografis merupakan perpindahan pekerja dari satu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya. Mobilitas pekerja secara geografis sama halnya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk terbagi menjadi dua yaitu perpindahan permanen dan nonpermanen. Penduduk dikatakan melakukan perpindahan permanen apabila pindah ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu satu tahun atau lebih. Perpindahan permanen terbagi menjadi dua yaitu migrasi risen dimana wilayah administrasi tempat tinggal sekarang berbeda dengan wilayah administrasi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu, dan migrasi seumur hidup, yaitu penduduk yang wilayah administrasi tempat tinggal sekarang berbeda dengan wilayah administrasi tempat kelahirannya. Mobilitas penduduk nonpermanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan (BPS, 2024). Mobilitas nonpermanen mencakup mobilitas komuter dan mobilitas sirkuler.

Mobilitas pekerjaan menurut Schettkat (1996), seseorang dikatakan melakukan mobilitas pekerjaan jika berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berpindah dari satu majikan ke majikan lain, berpindah dari satu industri ke industri lain, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, berpindah dari bekerja menjadi pengangguran, dan berpindah dari bekerja menjadi bukan angkatan kerja.

Beberapa faktor yang membuat pekerja migran memilih untuk tidak memiliki jaminan sosial, antara lain pekerja migran cenderung memiliki mobilitas tinggi dimana seringkali pekerjaan yang didapat juga merupakan pekerjaan jangka pendek, besaran iuran jaminan sosial dianggap tinggi oleh pekerja migran, dan manfaat jaminan sosial yang tidak bisa ditransfer antar

pekerjaan atau antar wilayah (Gao, Ying dan Li, 2012). Rendahnya partisipasi jaminan sosial oleh pekerja migran juga disebabkan karena kurangnya promosi (Giles dkk., 2021).

Menurut Hopkins dkk (2016), faktor yang menghambat partisipasi jaminan sosial pekerja migran internal adalah gabungan dari faktor desain kebijakan perlindungan sosial dan faktor administrasi, yaitu meliputi persyaratan pendaftaran yang kompleks dan mahal, kendala portabilitas, lemahnya penegakan aturan, biaya yang terkait dengan partisipasi. Selain itu, sektor dan sifat pekerjaan, yang terkait dengan kontrak kerja dan eligibilitas peserta, serta pengetahuan dan kesadaran yang terbatas juga berpengaruh terhadap partisipasi migran dalam jaminan sosial (Hopkins dkk., 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepesertaan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian Wahyu dan Yuliana (2023) menunjukkan kecenderungan mempunyai jaminan kecelakaan kerja lebih besar pada pekerja informal dengan karakteristik tinggal di perkotaan, laki – laki, pendapatan lebih besar atau sama dengan upah minimum provinsi, pernah menikah, usia 15-25 tahun, pendidikan minimal SMA, dan jumlah anggota rumah tangga maksimal 4 orang. Hasil penelitian Satriawan, Pitoyo, dan Giyarsih (2020) mendapatkan faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pekerja sektor informal di Indonesia adalah wilayah tempat tinggal, status perkawinan, status dalam rumah tangga, jenis kelamin, umur, kepemilikan NIK, tingkat pendidikan, lapangan usaha, keluhan kesehatan, status ekonomi, dan pengobatan sendiri.

Hasil penelitian Diana dan Syarvina (2022) menunjukkan faktor penyebab rendahnya kepesertaan bukan penerima upah adalah taraf penghasilan ekonomi yang rendah, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, kebutuhan pendidikan, hal ini yang menyebabkan para pekerja informal tidak menganggap betapa pentingnya jaminan sosial dan faktor terakhir adalah kurangnya informasi terkait jaminan sosial.

Hasil penelitian Gao, Yang, dan Li (2012) menunjukkan bahwa memiliki kontrak kerja jangka panjang meningkatkan cakupan jaminan sosial pekerja migran di China. Sementara itu, dengan menggunakan data dari survei Migrasi Desa-Kota tahun 2009 di China, hasil penelitian Wu dan Xiao (2018) menunjukkan bahwa memiliki kontrak kerja dan kestabilan pekerjaan berkorelasi positif dengan cakupan jaminan sosial di antara migran dari perdesaan.

Seseorang yang melakukan mobilitas pekerjaan harus melakukan pendaftaran ulang dan pemutakhiran data melalui tempat kerja yang baru untuk menjadi peserta jaminan sosial. Proses ini membutuhkan waktu dan kesadaran dari pekerja mengenai pentingnya jaminan sosial. Ketidaktaatan terhadap aturan dan administrasi dapat menghambat proses pendaftaran ulang maupun pemutakhiran data. Pekerja yang pindah ke jabatan atau sektor tertentu yang memiliki karakteristik berpendapatan rendah mungkin memilih tidak memiliki jaminan sosial karena kemampuan membayar iuran yang juga rendah.

Pekerja yang melakukan mobilitas geografis juga tidak terlepas dari proses pendaftaran maupun pemutakhiran data. Kurangnya informasi di tempat/wilayah baru, terutama wilayah yang jauh dari tempat asalnya, akan memengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki jaminan sosial. Sehingga, pekerja yang pindah ke wilayah yang lebih jauh mungkin akan memiliki kecenderungan kepemilikan jaminan sosial yang lebih rendah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pekerja yang melakukan mobilitas, baik mobilitas geografis maupun mobilitas pekerjaan, akan lebih cenderung untuk tidak memiliki jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *raw data* Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023. Data Sakernas mencakup seluruh wilayah dan menggambarkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Unit analisis pada penelitian ini adalah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja. Pertanyaan terkait kepemilikan jaminan sosial hanya ditanyakan ke responden dengan status pekerja penerima upah, maka unit analisis penelitian ini juga hanya

berfokus pada pekerja penerima upah. Penelitian ini juga berfokus pada pekerja bukan TNI/Polri serta pekerja yang memiliki pendapatan.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepemilikan jaminan sosial baik jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian yang diberikan/disediakan oleh instansi/ perusahaan/usaha tempat bekerja. Responden dengan jawaban tidak tahu tidak dimasukkan ke dalam analisis.

Variabel bebas utama dalam penelitian ini adalah mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja dibagi mobilitas geografis dan mobilitas pekerjaan. Mobilitas geografis menggunakan variabel status migran pekerja (tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu). Sedangkan untuk mobilitas pekerjaan, pekerja dianggap melakukan mobilitas pekerjaan jika berpindah pekerjaan dalam setahun terakhir.

Variabel-variabel dalam penelitian ini dan kategorisasinya dapat dilihat pada Tabel 1. Regional (pulau) didefinisikan sebagai regional Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Lainnya (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). Klasifikasi lapangan usaha berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pekerja termasuk ke lapangan usaha pertanian jika memiliki kode KBLI 01, termasuk ke lapangan usaha industri jika memiliki kode KBLI 02 – 05, termasuk ke lapangan usaha jasa jika memiliki kode KBLI 07 – 17, dan termasuk ke lapangan usaha konstruksi jika memiliki kode KBLI 06. Untuk klasifikasi jabatan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Pekerja termasuk ke *white collar* jika memiliki kode KBJI 1 (manajer), 2 (profesional), dan 3 (teknisi dan asisten profesional). Pekerja termasuk ke *blue collar* jika memiliki kode KBJI 6 (pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan), 7 (pekerja pengolahan, kerajinan, dan yang berhubungan dengan itu), 8 (operator dan perakitan mesin), dan 9 (pekerja kasar). Pekerja termasuk ke *grey collar* jika memiliki kode KBJI 4 (tenaga tata usaha) dan 5 (tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan).

Tabel 1. Variabel-variabel dalam Penelitian

No (1)	Variabel (2)	Simbol (3)	Definisi Operasional (4)	Kategori (5)
Variabel Terikat (Y)				
1	Kepemilikan Jaminan Sosial	jamkes	Memiliki Jaminan kesehatan	0. tidak memiliki* 1. memiliki
		jamkk	Memiliki Jaminan kecelakaan kerja	0. tidak memiliki* 1. memiliki
		jamkm	Memiliki jaminan kematian	0. tidak memiliki* 1. memiliki
Variabel Bebas (X)				
Variabel Bebas Utama				
2	Mobilitas Geografis	risen	Pekerja yang tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu	0. provinsi sama* 1. prov beda, pulau sama 2. prov beda, pulau sama
	Mobilitas Pekerjaan	pdh_kerja1	Pekerja yang pindah pekerjaan dalam setahun terakhir (lapangan usaha)	0. Tidak berpindah kerja* 1. Ya, KBLI sama 2. Ya, sekarang KBLI pertanian 3. Ya, sekarang KBLI Industri 4. Ya. sekarang KBLI Jasa

No	Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				5. Ya, sekarang KBLI Konstruksi
		<i>pdh_kerja2</i>	Pekerja yang pindah pekerjaan dalam setahun terakhir (jabatan)	0. Tidak berpindah kerja* 1. Ya, Jabatan sama 2. Ya, sekarang kerah putih 3. Ya, sekarang kerah biru 4. Ya, sekarang kerah abu-abu
Variabel Kontrol				
3	Umur	<i>umur</i>	Umur pekerja (dalam tahun)	Numerik
4	Jenis Kelamin	<i>jk</i>	Jenis kelamin pekerja	0. perempuan* 1. laki-laki
5	Wilayah tempat tinggal	<i>urban</i>	Daerah tempat tinggal pekerja	0. perdesaan* 1. perkotaan
6	Pendapatan	<i>Income</i>	Ln(Pendapatan)	Numerik
7	Status Perkawinan	<i>kawin</i>	Status perkawinan	0. belum kawin* 1. kawin/cerai
8	Pendidikan	<i>educ</i>	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	0. <SMA* 1. Minimal SMA
9	Sektor Pekerjaan	<i>sektor</i>	Sektor pekerjaan	0. pertanian* 1. industri 2. jasa
10	Jabatan pekerjaan	<i>collar</i>	Jabatan dalam pekerjaan	0. kerah putih* 1. kerah biru 2. kerah abu-abu
11	Sifat pekerjaan	<i>formal</i>	Pekerjaan formal/informal (mengacu <i>International Conference of Labour Statisticians</i> ke 17)	0. informal* 1. formal

Keterangan: *kategori referensi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis inferensial menggunakan regresi logistik biner karena variabel terikat bersifat kategorik dengan 2 kategori respon. Terdapat 9 model regresi dalam penelitian ini yaitu kombinasi antara 3 variabel terikat dan 3 variabel bebas utama. Hosmer, dkk (2013) menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis regresi logistik diperlukan pengujian signifikansi parameter baik secara simultan maupun parsial.

1. Pengujian parameter secara simultan

Uji simultan pada regresi logistik menggunakan uji *Likelihood Ratio*. Uji simultan adalah uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah variabel-variabel bebas berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Hosmer dkk, 2013). Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0, \text{ untuk } j = 1, 2, 3, \dots, k$$

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood tanpa var bebas}}{\text{likelihood dengan var bebas}} \right] \sim \chi_p^2$$

Statistik uji G mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas p (χ_p^2). Keputusannya tolak hipotesis nol jika $G > \chi_{\alpha, p}^2$ atau jika $p\text{-value} < \alpha$ yang artinya variabel-variabel bebas berpengaruh secara simultan atau terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Pengujian parameter secara parsial

Uji parsial pada regresi logistik menggunakan uji Wald (Hosmer dkk, 2013). Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel bebas mana saja yang signifikan mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_j = 0 \text{ (variabel bebas ke-} j \text{ tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat)}$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0 \text{ (variabel bebas ke-} j \text{ berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat)}$$

Statistik uji yang digunakan adalah uji *Wald*:

$$W_j = \left[\frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)} \right]^2 \sim \chi_1^2$$

dimana,

W_j = nilai statistik Uji *Wald*

$\hat{\beta}_j$ = penduga parameter β_j

$se(\hat{\beta}_j)$ = standar error dari penduga parameter β_j

Statistik uji W_j mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas 1 (χ_1^2) (Hosmer dkk, 2013). Keputusan tolak hipotesis nol jika $W_j > \chi_{\alpha, p}^2$ atau $p\text{-value} < \alpha$ yang artinya variabel bebas ke- j berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang tersaji dalam Tabel 2, pekerja yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 78.869 pekerja atau sekitar 38,90 persen, pekerja yang memiliki jaminan kecelakaan kerja sebanyak 70.131 pekerja atau sekitar 34,59 persen, dan pekerja yang memiliki jaminan kematian sebanyak 54.496 pekerja atau sekitar 26,88 persen. Dilihat dari status mobilitas pekerja, seperti yang tersaji pada Tabel 3, sebanyak 3.869 pekerja atau sekitar 1,91 persen merupakan pekerja risen atau pekerja yang provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu. Jika dilihat dari status mobilitas pekerjaan, sebanyak 10.144 pekerja atau sekitar lima persen merupakan pekerja yang berpindah pekerjaan dalam satu tahun terakhir.

Tabel 2. Distribusi Unit Analisis/Sampel Penelitian berdasarkan Kepemilikan Jaminan Sosial

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepemilikan Jaminan Kesehatan	Ya	78.869	38,90
	Tidak	121.437	59,89
	Tidak Tahu	2.462	1,21
Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja	Ya	70.131	34,59
	Tidak	129.698	63,96
	Tidak Tahu	2.939	1,45
Kepemilikan Jaminan Kematian	Ya	54.496	26,88
	Tidak	144.476	71,25
	Tidak Tahu	3.796	1,87

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

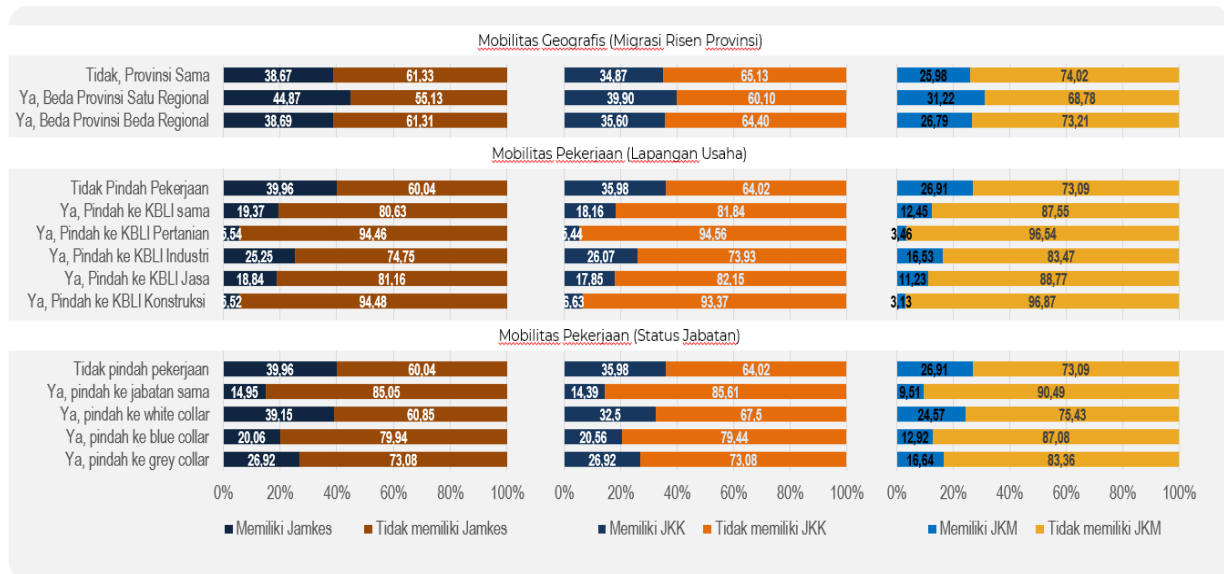
Tabel 3. Distribusi Unit Analisis/Sampel Penelitian berdasarkan Status Mobilitas Pekerja

Karakteristik (1)	Kategori (2)	Jumlah (3)	Persentase (4)
Pekerja Melakukan Mobilitas Geografis (Migrasi Risen Prov)	Ya, Beda Provinsi Satu Regional	2.037	1,00
	Ya, Beda Provinsi Beda Regional	1.832	0,90
	Tidak, Provinsi Sama	198.899	98,09
Pekerja Melakukan Mobilitas Pekerjaan (Lapangan Usaha)	Ya, Pindah ke KBLI yang sama	6.013	2,97
	Ya, Pindah ke KBLI Pertanian	687	0,34
	Ya, Pindah ke KBLI Industri	968	0,48
	Ya, Pindah ke KBLI Jasa	1.353	0,67
	Ya, Pindah ke KBLI Konstruksi	1.123	0,55
	Tidak Pindah Pekerjaan	192.624	95,00
	Ya, Pindah ke Jabatan yang sama	7.793	3,84
	Ya, Pindah ke <i>White Collar</i>	489	0,24
Pekerja Melakukan Mobilitas Pekerjaan (Status Jabatan)	Ya, Pindah ke <i>Blue Collar</i>	958	0,47
	Ya, Pindah ke <i>Grey Collar</i>	904	0,45
	Tidak Pindah Pekerjaan	192.624	95,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

Berdasarkan karakteristik mobilitas pekerja, sesuai Gambar 1, terlihat bahwa sebanyak 38,87 persen dari pekerja yang tidak melakukan migrasi risen (berpindah provinsi) memiliki jaminan kesehatan yang disediakan perusahaan/tempat kerja. Angka ini lebih rendah dibandingkan pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi dalam satu regional (44,87 persen) dan juga sedikit lebih rendah dibandingkan pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi beda regional (38,69 persen). Pola ini mirip untuk kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dimana angka kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tertinggi adalah pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi dalam satu regional (39,90 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan 31,22 persen untuk jaminan kematian).

Gambar 1. Kepemilikan Jaminan Sosial berdasarkan Status Mobilitas Pekerja



Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

Jaminan kesehatan lebih banyak dimiliki oleh pekerja yang tidak melakukan perpindahan pekerjaan, yaitu sebanyak 39,96 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kepemilikan jaminan kesehatan oleh pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan dalam KBLI yang sama (19,37 persen), pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan ke KBLI pertanian (5,54 persen), pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan ke KBLI industri (25,25 persen), pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan ke KBLI jasa (18,84 persen) dan pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan ke KBLI konstruksi (5,52 persen). Pola kepemilikan ini mirip untuk kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan karakteristik perpindahan pekerjaan dalam hal lapangan usaha (KBLI).

Dilihat dari karakteristik perpindahan pekerjaan dalam hal status jabatan, kepemilikan jaminan kesehatan oleh pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan menjadi pekerja *white collar* hampir sama (39,15 persen) dibandingkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan pekerjaan (39,96 persen). Sementara itu, angka kepemilikan jaminan kesehatan lebih rendah untuk pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan ke dalam status jabatan yang sama (14,95 persen), pekerja yang melakukan perpindahan menjadi pekerja *blue collar* (20,06 persen), dan pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan menjadi pekerja *grey collar* (26,92 persen). Pola kepemilikan ini juga mirip untuk kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan karakteristik perpindahan pekerjaan dalam hal status jabatan.

Tabel 4. Hasil Regresi Logistik Biner (Model 1, Model 2, dan Model 3)

Variabel	Model 1 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 2 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 3 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Konstanta	-28,65***	0,0000	-25,42***	0,0000	-26,91***	0,0000
Variabel Bebas Utama						
Mobilitas Geografis (Migrasi Risen)						
Tidak, Provinsi Sama (ref)						
Ya, Bada Prov-Satu Regional	-0,1004	0,9045	-0,1129**	0,8843	-0,1186*	0,8882

Variabel	Model 1 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 2 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 3 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Ya, Beda Prov-Beda Regional	-0,3039***	0,7379	-0,2985***	0,7419	-0,2509***	0,7781
Variabel Kontrol						
Umur	0,0001	1,0001	-0,0082***	0,9918	0,0032***	1,0032
Jenis Kelamin						
Perempuan (ref)						
Laki-laki	-0,3270***	0,7211	-0,1698***	0,8439	-0,2635***	0,7684
Status Perkawinan						
Belum kawin (ref)						
Kawin/pernah kawin	0,3139***	1,3688	0,2775***	1,3198	0,3210***	1,3786
Wilayah Tempat Tinggal						
Perdesaan (ref)						
Perkotaan	0,0900***	1,0942	0,1779***	1,1947	0,0731***	1,0758
Pendapatan	1,8341***	6,2595	1,5903***	4,9053	1,6368***	5,1386
Pendidikan						
SMP ke Bawah (ref)						
Minimal SMA	1,1033***	3,0141	0,9913***	2,6948	0,9747***	2,6505
Sektor Pekerjaan						
Pertanian (ref)						
Industri	-0,3365***	0,7143	-0,2499***	0,7789	-0,3486***	0,7057
Jasa	-0,2684***	0,7646	-0,4565***	0,6335	-0,5096***	0,6007
Jabatan Pekerjaan						
White Collar (ref)						
Blue Collar	-0,9745***	0,3774	-0,4058***	0,6664	-0,6060***	0,5455
Grey Collar	-0,4239***	0,6545	-0,0582***	0,9435	-0,2587***	0,7720
Sifat Pekerjaan						
Informal (ref)						
Formal	2,0559***	7,8135	2,0517***	7,7809	2,1105***	8,2521
Log Likelihood	-73718,628		-79911,552		-72243,361	
LR chi2	121130,14		99169,61		89141,22	
Prob>chi2	0,0000		0,0000		0,0000	
Pseudo R2	0,4510		0,3829		0,3816	
Jumlah Observasi	200.306		199.829		198.972	

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

Tabel 5. Hasil Regresi Logistik Biner (Model 4, Model 5, dan Model 6)

Variabel	Model 4 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 5 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 6 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Konstanta	-28,43***	0,0000	-25,20***	0,0000	-26,70***	0,0000
Variabel Bebas Utama						
Mobilitas Pekerjaan (Berpindah Lapangan Usaha)						
Tidak pindah kerja (ref)						
Ya, ke KBLI yang sama	-0,8853***	0,4126	-0,7391***	0,4776	-0,6178***	0,5392
Ya, ke KBLI Pertanian	-1,1264***	0,3242	-1,1262***	0,3243	-1,0957***	0,3343
Ya, ke KBLI Industri	-0,1824*	0,8333	-0,1770*	0,8378	-0,1967*	0,8215

Variabel	Model 4 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 5 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 6 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Ya, ke KBLI Jasa	-0,7050***	0,4941	-0,4731***	0,6231	-0,4924***	0,6111
Ya, ke KBLI Konstruksi	-1,6729***	0,1877	-1,4661***	0,2308	-1,6718***	0,1879
Variabel Kontrol						
Umur	-0,0003	0,9997	-0,0086***	0,9915	0,0029***	1,0030
Jenis Kelamin						
Perempuan (ref)						
Laki-laki	-0,3137***	0,7307	-0,1590***	0,8530	-0,2545***	0,7753
Status Perkawinan						
Belum kawin (ref)						
Kawin/ pernah kawin	0,3111***	1,3650	0,2755***	1,3172	0,3189***	1,3756
Wilayah Tempat Tinggal						
Perdesaan (ref)						
Perkotaan	0,0939***	1,0985	0,1810***	1,1984	0,0743***	1,0771
Pendapatan	1,8215***	6,1810	1,5774***	4,8424	1,6247***	5,0768
Pendidikan						
SMP ke Bawah (ref)						
Minimal SMA	1,0979***	2,9978	0,9862***	2,6809	0,9677***	2,6319
Sektor Pekerjaan						
Pertanian (ref)						
Industri	-0,3436***	0,7092	-0,2564***	0,7738	-0,3502***	0,7045
Jasa	-0,2858***	0,7514	-0,4750***	0,6219	-0,5209***	0,5940
Jabatan Pekerjaan						
White Collar (ref)						
Blue Collar	-0,9581***	0,3836	-0,3923***	0,6755	-0,5958***	0,5511
Grey Collar	-0,4124***	0,6621	-0,0505***	0,9507	-0,2540***	0,7757
Sifat Pekerjaan						
Informal (ref)						
Formal	2,0681***	7,9096	2,0622***	7,8634	2,1165***	8,3017
Log Likelihood	-73352,203		-79634,209		-72063,704	
LR chi2	121862,99		99724,30		89500,54	
Prob>chi2	0,0000		0,0000		0,0000	
Pseudo R2	0,4538		0,3850		0,3831	
Jumlah Observasi	200.306		199.829		198.972	

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

Tabel 6. Hasil Regresi Logistik Biner (Model 7, Model 8, dan Model 9)

Variabel	Model 7 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 8 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 9 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Konstanta	-28,44***	0,0000	-25,23***	0,0000	-26,71***	0,0000
Variabel Bebas Utama						
Mobilitas Pekerjaan (Berpindah Status Jabatan)						
Tidak pindah kerja (ref)						
Ya, Jabatan Sama	-0,9189***	0,3990	-0,8045***	0,4473	-0,6958***	0,4987

Variabel	Model 7 (Y = Jaminan Kesehatan)		Model 8 (Y = Jaminan Kecelakaan Kerja)		Model 9 (Y = Jaminan Kematian)	
	Koef	OR	Koef	OR	Koef	OR
Ya, ke <i>White Collar</i>	-0,5141***	0,5980	-0,1596	0,8525	-0,3631***	0,6955
Ya, ke <i>Blue Collar</i>	-0,5367***	0,5847	-0,5056***	0,6031	-0,4210***	0,6564
Ya, ke <i>Grey Collar</i>	-0,8924***	0,4097	-0,6745***	0,5094	-0,6483***	0,5230
Variabel Kontrol						
Umur	-0,0004	0,9996	-0,0086***	0,9915	0,0029***	1,0029
Jenis Kelamin						
Perempuan (ref)						
Laki-laki	-0,3157***	0,7293	-0,1614***	0,8510	-0,2563***	0,7739
Status Perkawinan						
Belum kawin (ref)						
Kawin/pernah kawin	0,3107***	1,3644	0,2751***	1,3166	0,3181***	1,3745
Wilayah Tempat Tinggal						
Perdesaan (ref)						
Perkotaan	0,0936***	1,0981	0,1808***	1,1982	0,0745***	1,0774
Pendapatan	1,8222***	6,1851	1,5784***	4,8474	1,6255***	5,0808
Pendidikan						
SMP ke Bawah (ref)						
Minimal SMA	1,0975***	2,9965	0,9860***	2,6804	0,9675***	2,6314
Sektor Pekerjaan						
Pertanian (ref)						
Industri	-0,3397***	0,7120	-0,2525***	0,7769	-0,3488***	0,7055
Jasa	-0,2840***	0,7527	-0,4697***	0,6252	-0,5175***	0,5960
Jabatan Pekerjaan						
<i>White Collar</i> (ref)						
<i>Blue Collar</i>	-0,9557***	0,3845	-0,3854***	0,6802	-0,5938***	0,5522
<i>Grey Collar</i>	-0,4058***	0,6664	-0,0432**	0,9578	-0,2499***	0,7789
Sifat Pekerjaan						
Informal (ref)						
Formal	2,0689***	7,9163	2,0634***	7,8725	2,1174***	8,3092
Log Likelihood	-73388,308		-79661,346		-72092,912	
LR chi2	121790,78		99670,02		89442,12	
Prob>chi2	0,0000		0,0000		0,0000	
Pseudo R2	0,4535		0,3848		0,3828	
Jumlah Observasi	200.306		199.829		198.972	

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS (diolah penulis)

Pengujian simultan menunjukkan *p-value* untuk masing-masing model lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti pada tingkat kepercayaan 95 persen seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan jaminan sosial. Atau dengan kata lain model regresi logistik biner yang dihasilkan sudah sesuai karena setidaknya terdapat satu variabel bebas yang dapat menjelaskan kecenderungan kepemilikan jaminan sosial di Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial menggunakan statistik uji Wald pada masing-masing variabel bebas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara mobilitas geografis dengan kepemilikan jaminan sosial. Setelah dikontrol variabel bebas lainnya, berdasarkan hasil

regresi logistik biner, pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi dalam satu regional memiliki kecenderungan 0,90 kali untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan pekerja yang tidak melakukan migrasi risen antar provinsi, *ceteris paribus*, namun angka ini tidak signifikan secara statistik. Secara umum, pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi baik dalam satu regional maupun beda regional memiliki kecenderungan kepemilikan jaminan sosial lebih rendah daripada pekerja yang tidak melakukan migrasi risen provinsi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara mobilitas pekerjaan terkait lapangan usaha dengan kepemilikan jaminan sosial. Setelah dikontrol variabel bebas lainnya, pekerja yang melakukan pindah kerja dalam setahun terakhir memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memiliki jaminan sosial dibandingkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan pekerjaan. Kecenderungan kepemilikan jaminan sosial paling rendah dialami pekerja yang berpindah ke KBLI konstruksi.

Variabel mobilitas pekerjaan terkait status jabatan pekerja secara statistik juga signifikan berhubungan dengan kepemilikan jaminan sosial. Setelah dikontrol variabel bebas lainnya, dibandingkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan pekerjaan, pekerja yang melakukan pindah pekerjaan dan menjadi pekerja *white collar* memiliki kecenderungan 0,58 kali untuk memiliki jaminan kesehatan dan 0,69 kali untuk memiliki jaminan kematian, *ceteris paribus*. Pekerja *white collar* memiliki risiko kehilangan jaminan sosial paling rendah dibanding pekerja yang pindah ke kategori pindah jabatan lainnya.

Tabel 7. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Migran (Pindah Tempat Tinggal) berdasarkan Regional Saat Ini menurut Regional Asal

Regional Asal	Regional Saat Ini					Jumlah Observasi (n)
	Jawa/Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa/Bali	ref	0,6274**	1,3527	0,7826	0,6326**	2.014
Sumatera	1,0188	ref	2,7667	1,3523	0,3879	749
Kalimantan	0,2770***	1,6532	ref	0,3346	0,1147***	328
Sulawesi	0,5899	0,4265	1,1529	ref	0,5035**	409
Lainnya ¹	0,3449*	2,5567	2,0070	0,5548	ref	305

¹ Lainnya: Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Keterangan signifikansi ***: p<0,01; **: p<0,05; *: p<0,1

Tabel 8. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan KBLI Saat Ini menurut KBLI Asal

KBLI Asal	KBLI Saat Ini				Jumlah Observasi (n)
	Pertanian	Industri	Jasa	Konstruksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	ref	3,4053***	1,6229*	0,6711	3.183
Industri	0,2214***	ref	0,6215**	0,2101***	1.494
Jasa	0,9475	1,4979***	ref	0,3863***	3.828
Konstruksi	3,6213***	5,5720***	3,0020***	ref	1.464

Keterangan signifikansi ***: p<0,01; **: p<0,05; *: p<0,1

Tabel 9. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan Jabatan Saat Ini menurut Jabatan Sebelumnya

Jabatan Asal	Jabatan Saat Ini			Jumlah Observasi (n)
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	<i>Grey Collar</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>White Collar</i>	ref	0,6743	0,5677**	716
<i>Blue Collar</i>	3,9354***	ref	1,3103*	7.046
<i>Grey Collar</i>	1,7101**	0,6770**	ref	2.205

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Analisis dilanjutkan dengan membagi sampel (subsampel) berdasarkan regional tempat tinggal sebelumnya, sektor pekerjaan sebelumnya, dan jabatan sebelumnya. Analisis ini berfokus hanya pada pekerja yang pindah baik pindah tempat tinggal maupun pindah pekerjaan. Berdasarkan Tabel 7 – Tabel 9, pekerja yang pindah ke Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memiliki jaminan Kesehatan dibandingkan pekerja yang pindah masih dalam satu regional. Pekerja yang pindah ke sektor industri atau dari sektor konstruksi kecenderungannya lebih tinggi memiliki jaminan Kesehatan dibandingkan pekerja yang pindah dalam sektor yang sama. Pekerja yang pindah dari sektor industri kecenderungannya lebih rendah memiliki jaminan Kesehatan dibandingkan pekerja yang pindah dalam sektor yang sama. Pekerja yang pindah ke *white collar* atau pindah dari *blue collar* lebih cenderung memiliki jaminan Kesehatan dibandingkan mereka yang pindah dalam jabatan yang sama.

Tabel 10. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran (Pindah Tempat Tinggal) berdasarkan Regional Saat Ini menurut Regional Asal

Regional Asal	Regional Saat Ini					Jumlah Observasi (n)
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa	Ref	1,0966	1,1029	0,9551	0,5755***	2.004
Sumatera	1,2813	ref	4,2118*	0,5306	0,0874***	747
Kalimantan	0,5737	0,7876	ref	0,5871	0,2900*	327
Sulawesi	0,5159	0,4189	0,5541	ref	0,2945***	407
Lainnya ¹	0,6797	4,5072	3,9300*	1,0130	ref	305

¹ Lainnya: Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Tabel 11. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan KBLI Saat Ini menurut KBLI Asal

KBLI Asal	KBLI Saat Ini				Jumlah Observasi (n)
	Pertanian	Industri	Jasa	Konstruksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	ref	3,0415***	1,5773	1,1056	3.180
Industri	0,2081***	ref	0,5517***	0,2002***	1.491
Jasa	1,0246	1,7326***	ref	0,3872***	3.822
Konstruksi	2,8623**	4,4387***	2,5475***	ref	1.460

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Tabel 12. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan Jabatan Saat Ini menurut Jabatan Sebelumnya

Jabatan Asal	Jabatan Saat Ini			Jumlah Observasi (n)
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	<i>Grey Collar</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>White Collar</i>	ref	0,6220	0,5957**	714
<i>Blue Collar</i>	2,3375***	ref	1,1854	7.037
<i>Grey Collar</i>	1,6796***	0,7863	ref	2.200

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Berdasarkan Tabel 10 – Tabel 12., pekerja yang pindah ke Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memiliki jaminan kecelakaan kerja dibandingkan pekerja yang pindah masih dalam satu regional. Pekerja yang pindah ke sektor industri atau dari sektor konstruksi kecenderungannya lebih tinggi memiliki jaminan kecelakaan kerja dibandingkan pekerja yang pindah dalam sektor yang sama. Pekerja yang pindah dari sektor industri kecenderungannya lebih rendah memiliki jaminan kecelakaan kerja dibandingkan pekerja yang pindah dalam sektor yang sama. Pekerja yang pindah ke *white collar* lebih cenderung memiliki jaminan kecelakaan kerja dibandingkan mereka yang pindah dalam jabatan yang sama.

Tabel 13. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kematian Pekerja Migran (Pindah Tempat Tinggal) berdasarkan Regional Saat Ini menurut Regional Asal

Regional Asal	Regional Saat Ini					Jumlah Observasi (n)
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa	ref	0,8968	1,1473	1,0143	0,4473***	1.997
Sumatera	0,8037	ref	1,1973	0,8635	0,1758*	742
Kalimantan	0,5320	0,9707	ref	0,4489	0,4579	326
Sulawesi	0,7936	1,2199	0,9910	ref	0,4687**	407
Lainnya ¹	0,8329	17,5956***	10,9390***	1,0726	ref	302

¹ Lainnya: Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Tabel 14. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kematian Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan KBLI Saat Ini menurut KBLI Asal

KBLI Asal	KBLI Saat Ini				Jumlah Observasi (n)
	Pertanian	Industri	Jasa	Konstruksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	ref	3,1875***	1,3533	0,5104*	3.175
Industri	0,1417***	ref	0,5637**	0,2457***	1.487
Jasa	1,2338	1,3009	ref	0,3493***	3.815

Konstruksi	2,5160*	4,7367***	0,9877	ref	1.459
------------	----------------	------------------	--------	------------	-------

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Tabel 15. Kecenderungan (*odds ratio*) Kepemilikan Jaminan Kematian Pekerja Migran (Pindah Pekerjaan) berdasarkan Jabatan Saat Ini menurut Jabatan Sebelumnya

Jabatan Asal	Jabatan Saat Ini			Jumlah Observasi (n)
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	<i>Grey Collar</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>White Collar</i>	ref	0,5362*	0,5300***	713
<i>Blue Collar</i>	2,2170***	ref	1,1370	7.024
<i>Grey Collar</i>	1,6235**	0,7712	ref	2.197

Keterangan signifikansi ***: $p < 0,01$; **: $p < 0,05$; *: $p < 0,1$

Berdasarkan Tabel 13 – Tabel 15, pekerja yang pindah ke Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memiliki jaminan kematian dibandingkan pekerja yang pindah masih dalam satu regional. Pekerja yang pindah ke sektor konstruksi atau dari sektor industri kecenderungannya lebih rendah memiliki jaminan kematian dibandingkan pekerja yang pindah dalam sektor yang sama. Pekerja yang pindah ke *white collar* lebih cenderung memiliki jaminan kematian dibandingkan mereka yang pindah dalam jabatan yang sama. Pekerja yang pindah dari *white collar* kurang cenderung memiliki jaminan kematian dibandingkan mereka yang pindah dalam jabatan yang sama.

Dari hasil analisis inferensial menunjukkan hubungan antara mobilitas geografis dan kepesertaan jaminan sosial. Pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi baik dalam satu regional maupun beda regional memiliki kecenderungan kepesertaan jaminan sosial lebih rendah daripada pekerja yang tidak melakukan migrasi risen provinsi. Meskipun secara statistik, tidak cukup bukti untuk mengatakan terdapat perbedaan kepesertaan jaminan kesehatan antara pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi dalam satu regional dengan pekerja yang tidak melakukan migrasi risen provinsi. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa pekerja yang melakukan mobilitas geografis cenderung untuk tidak memiliki jaminan sosial.

Rendahnya kepesertaan jaminan sosial oleh pekerja migran disebabkan beberapa hal. Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang melakukan mobilitas geografis tidak lepas dari keharusan untuk mendaftar ulang di tempat yang baru. Pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi beda regional memiliki kecenderungan kepesertaan jaminan sosial paling rendah. Ini berkaitan dengan jarak migrasi yang lebih jauh. Seseorang yang migrasi dalam jarak yang jauh membutuhkan daya dan usaha yang lebih besar dibandingkan migrasi dalam jarak yang dekat. Perbedaan lingkungan dan budaya untuk mereka yang migrasi lebih jauh juga lebih terasa. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk beradaptasi. Informasi mengenai hal-hal di tempat baru masih minim, termasuk informasi mengenai jaminan sosial. Hal ini dapat menghambat mereka dalam proses pendaftaran ulang/perubahan data maupun pemenuhan persyaratan administrasi untuk tetap menjadi peserta jaminan sosial.

Proses pendaftaran ini juga tergantung pada perbedaan infrastruktur dan geografis antar daerah. Dengan adanya perbedaan infrastruktur antar daerah menyebabkan perbedaan pada akses informasi dan akses terhadap jaminan sosial antar regional. Ini juga terlihat dari analisis subsampel dimana pekerja yang pindah ke Nusa Tenggara, Maluku dan Papua cenderung untuk

tidak memiliki jaminan sosial. Pengetahuan dan kesadaran yang terbatas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi migran dalam jaminan sosial (Hopkins, dkk, 2016). Oleh karena itu, pemerintah dan penyedia jaminan sosial harus lebih banyak melakukan promosi dan edukasi untuk membantu pekerja migran memahami skema jaminan sosial dan meningkatkan kesadaran mereka.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara mobilitas pekerjaan dengan kepesertaan jaminan sosial. Pekerja yang melakukan pindah kerja dalam setahun terakhir memiliki kecenderungan lebih rendah (kurang cenderung) untuk memiliki jaminan sosial dibandingkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan pekerjaan. Hasil ini sesuai dengan analisis deskriptif (*bivariate*) dan sesuai dengan hipotesis penelitian.

Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan tidak terlepas dari karakteristik lapangan usaha, pekerjaan-pekerjaan di sektor konstruksi lebih banyak didominasi pekerja bebas (informal, pekerjaan tidak stabil dan pendapatan lebih rendah) dibandingkan sektor lainnya. Hal ini berpengaruh kepada kemampuan pekerja dalam kepesertaan jaminan sosial. Qin, dkk (2014) menunjukkan bahwa meskipun memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan, pekerja migran seringkali memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah karena mereka tidak dapat menjamin keberlanjutan pembayaran premi (kontribusi). Hal ini menjelaskan pekerja yang pindah ke sektor konstruksi memiliki risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial paling besar. Begitupun, pekerja yang pindah ke sektor pertanian.

Dari sisi penyedia jaminan sosial, mereka juga mungkin kurang memprioritaskan pekerja migran. Dari segi penegakkan aturan jaminan sosial, lebih mudah menerapkan aturan tersebut pada pekerja di sektor pemerintahan atau pekerja pada sektor formal yang pendapatannya lebih tinggi dan stabil. Dari sisi pemberi kerja, mereka juga mungkin tidak melaporkan atau mendaftarkan seluruh pegawainya untuk mengurangi beban biaya. Sebagian besar iuran jaminan sosial dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan beberapa pekerjaan memiliki risiko lebih tinggi seperti pada sektor konstruksi dan pertanian, berdampak pada iuran yang lebih tinggi juga. Hal ini juga dapat menjelaskan tingginya risiko kehilangan jaminan sosial pekerja yang pindah ke sektor konstruksi dan pertanian.

Jabatan seseorang mempengaruhi kebijakan perusahaan/tempat kerja, pekerja *white collar* (meskipun belum lama bekerja) dianggap asset berharga sehingga akan lebih “dilindungi”. Pekerja *white collar* secara karakter memiliki pendidikan maupun pendapatan yang lebih tinggi, kesadaran tentang jaminan sosial maupun kemampuan membayar iuran juga lebih tinggi, sehingga risiko kehilangan jaminan sosial pekerja yang pindah ke *white collar* lebih rendah dibandingkan pekerja yang pindah ke *blue collar* atau *grey collar*.

Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan disebabkan karena keharusan untuk mendaftar ulang di tempat kerja yang baru yang mana membutuhkan waktu, biaya, kesadaran dan ketaatan administrasi dari pekerja dan pemberi kerja. Sama halnya dengan pendaftaran jaminan kesehatan, pendaftaran atau perubahan data jaminan ketenagakerjaan juga membutuhkan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Faktor ketaatan pada aturan dan administrasi berperan penting dalam proses pendaftaran. Ketika peserta jaminan sosial berpindah pekerjaan, mereka dapat langsung mendaftar ulang jika tidak ada kendala administrasi. Dalam beberapa kasus, ketika perusahaan atau tempat kerja baru ingin mendaftarkan peserta jaminan sosial, terdapat tunggakan iuran yang belum dibayar. Tunggakan ini dapat muncul karena ketika peserta kehilangan pekerjaan di pekerjaan sebelumnya, mereka merubah kepesertaan menjadi peserta mandiri namun tidak membayar iuran. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran peserta di tempat kerja yang baru.

Rendahnya kepesertaan jaminan sosial juga bisa disebabkan karena faktor kesengajaan. Berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2022, manfaat jaminan hari tua

dapat dicairkan sebelum mencapai usia pensiun (56 tahun) dengan beberapa kondisi seperti pekerja yang mengundurkan diri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang mengalami cacat total tetap dan pekerja yang meninggal dunia. Pekerja bisa saja memanfaatkan celah pada peraturan ini, yaitu ketika dia sebenarnya sudah diterima kerja di tempat baru namun tidak segera mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial karena ingin mencairkan manfaat jaminan hari tua terlebih dahulu. Pencairan manfaat jaminan hari tua harus menunggu selang satu bulan sejak pekerja berhenti bekerja pada pekerjaan sebelumnya. Kesengajaan penundaan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ini juga dapat menjelaskan rendahnya kepesertaan jaminan sosial pada pekerja yang melakukan pindah pekerjaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara mobilitas tenaga kerja dan kepesertaan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang melakukan mobilitas geografis dan mobilitas pekerjaan memiliki kecenderungan tidak memiliki jaminan sosial dibandingkan pekerja yang tidak melakukan mobilitas. Pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi antar regional memiliki risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial lebih besar daripada pekerja yang melakukan migrasi risen antar provinsi satu regional.

Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial yang paling besar pada pekerja yang pindah kerja ke sektor konstruksi. Pekerja yang pindah ke *white collar* memiliki risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial paling rendah.

Risiko kehilangan kepesertaan jaminan sosial pekerja yang melakukan mobilitas disebabkan oleh keharusan untuk mendaftarkan ulang atau pemutakhiran data. Jabatan, sektor pekerjaan, kondisi geografis, infrastruktur di daerah, kebijakan perusahaan dan kurangnya sosialisasi (informasi) serta faktor kesengajaan dapat mempengaruhi keputusan pekerja untuk melakukan pendaftaran ulang atau pemutakhiran data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia kurang portabel.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu kebijakan/aturan/standar operasional prosedur yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran maupun pemutakhiran data khususnya untuk pekerja migran (*migrant-friendly*). Diperlukan juga sosialisasi, edukasi maupun pemerataan akses informasi terkait pentingnya jaminan sosial serta mekanisme/prosedur ketika pekerja pindah pekerjaan atau pindah tempat tinggal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung dalam penyelesaian penulisan artikel ini. Atas kerjasamanya sehingga analisis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2016). *The Social Protection Indicator: Assessing Results for Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- BPJS Ketengakerjaan. (2018). Laporan Keuangan 2017 BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_2017_BPJS_Ketenagakerjaan.png
- BPJS Ketengakerjaan. (2020). Laporan Keuangan 2019 BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_Audit_2019_-_BPJS_Ketenagakerjaan@4x-100.pdf
- BPJS Ketengakerjaan. (2022). Laporan Keuangan 2021 BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/LK_LPP_BPJAMSOSTEK_2021.pdf

- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). Laporan Keuangan 2023 BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_2023_BPJS_Ketenagakerjaan.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/f8c567805aa8a6977bd4594a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/26/b07cde6196c248635467c2af/analisis-mobilitas-tenaga-kerja-hasil-sakernas-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota SAKERNAS Agustus 2024. Jakarta: BPS.
- D. W. Hosmer, S. Lemeshow, & R. X. Sturdivant. (2013). *Applied logistic Regression (3rd ed)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Diana & Syarvina, W. (2022). Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>
- Gao, Q., Yang, S., & Li, S. (2012). Labor contracts and social insurance participation among migrant workers in China. *China Economic Review* 23(4): 1195–1205. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2012.09.002>
- Giles, John T., Meng, X., Xue, S., & Zhao, G. (2021). Can Information Influence the Social Insurance Participation Decision of China's Rural Migrants? *Journal of Development Economics*, 2021,150,102645. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102645>
- Hickey, S. & J. Seekings (2017). *The global politics of social protection. WIDER Working Paper 2017/115*. Helsinki: United Nations University World Institute for Development Economics Research. <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-115.pdf>
- Hopkins, E., Hagen-Zanker, J., & Bastagli, F. (2016). *Internal Migrants and Social Protection: a Review of Eligibility and Take-Up. Working Paper 436*. London: ODI. <https://cdn.odi.org/media/documents/10522.pdf>
- Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27869/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202009.pdf>
- Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28701/UU%2024%20Tahun%202011.pdf>
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28927/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202015.pdf>
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Program Jaminan Pensiun. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28931/PP%20Nomor%2045%20Tahun%202015.pdf>
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Program Jaminan Hari Tua. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28934/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202015.pdf>
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Download/244293/PP%20Nomor%2037%20Tahun%202021.pdf>
- Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/204689/Permenaker%20Nomor%204%20Tahun%202022.pdf>
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th Ed.)*. Boston: Cengage Learning, Inc.
- Qin, X., Pan, J. & Liu, G.G. (2014) 'Does participating in health insurance benefit migrant workers in China? An empirical investigation', *China Economic Review* 30: 262–78.
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *TATALOKA*, 23(2), 263-280. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280>.
- Schettkat, Ronald. (1996). *The Flow Analysis of Labour Markets*. London: Routledge.
- Schüring, E. & Loewe, M. (2021). *Handbook on Social Protection Systems*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (Terjemahan Indonesia). https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf
- Wahyu, H. & Yuliana, L. (2023). Determinan Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Informal di Provinsi Jawa Timur. *Special Issue: Seminar Nasional Statistika XI 2022*. <http://dx.doi.org/10.12962/j27213862.v1i1.19124>
- Wu, Y. & Xiao, H. (2018). Social insurance participation among rural migrants in reform era China. *Asian and Pacific Migration Journal* 27(4): 383–403.